



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melengkapi ketentuan dengan menambahkan definisi operasional dan menambah rumus pada formulasi dalam Indikator Kinerja Utama guna lebih efektif dan efisiennya pelaksanaan IKU Kabupaten Katingan, sehingga dirasa perlu untuk melakukan Perubahan Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 – 2026

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Katingan 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 774) diubah, sebagai berikut :

Pasal I

1. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Katingan 2024-2026 diubah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2 huruf c diubah sehingga Pasal 2 huruf c berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- a. IKU dalam Peraturan Bupati ini merupakan Indikator Sasaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan 2024-2026;
- b. IKU yang tercantum dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan 2024-2026, maka perhitungan data dimulai pada tahun penetapan Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 24 Maret 2025

BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 24 Maret 2025



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

DEWI FERRAS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025 NOMOR 831

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR
6 TAHUN 2024 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Satuan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Memperkuat struktur ekonomi daerah yang maju dan berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) adalah persentase perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) riil suatu wilayah atau negara dalam periode tertentu, biasanya dihitung secara tahunan. PDB riil mengukur nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu ekonomi, disesuaikan dengan tingkat inflasi, sehingga mencerminkan perubahan nyata dalam produksi.	Pertumbuhan ekonomi wilayah dari tahun t-1 ke tahun t $r_t = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100\%$ dengan: rt = laju pertumbuhan PDRB tahun t; Yt = PDRB atas dasar harga konstan tahun t; Yt-1 = PDRB atas dasar harga konstan tahun t-1.	Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan
		PDRB per Kapita	PDRB per Kapita adalah indikator ekonomi yang mengukur rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu, biasanya satu tahun.	Nilai PDB atau PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu $PDB \text{ per kapita} = \frac{PDB}{\sum \text{penduduk}}$ $PDRB \text{ per kapita} = \frac{PDRB}{\sum \text{penduduk}}$	Juta Rp.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan
	1.1 Meningkatnya daya dukung dan pertumbuhan sektor potensial daerah sebagai	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Indikator yang kategori usaha mencakup subkategori usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri dari : tanaman pangan, tanaman	Ket : PDRB atas dasar harga konstan t=tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya P=kategori pertanian, kehutanan dan	Persen	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan

9 81 16

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Satuan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
	modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ketahanan pangan		hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, Subkategori Usaha kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Sub kategori Usaha Perikanan	perikanan			
		Persentase Kecamatan Rawan Pangan	Merupakan persentase dari kecamatan yang memiliki kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi	Jumlah kecamatan rentan rawan pangan dibagi jumlah keseluruhan kecamatan di kabupaten dikali 100 persen	Persen	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Hasil Perhitungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Subkategori ini mencakup kegiatan ekonomi di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, baik penjualan secara grosir perdagangan besar) maupun eceran dan merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan dan reparasi mobil dan sepeda motor	Pertumbuhan ekonomi wilayah berdasarkan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Resparasi Mobil dan Sepeda Motor dari tahun t-1 ke tahun t $r_t = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100\%$ dengan: rt = laju pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Resparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun t; Yt = PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Resparasi Mobil dan Sepeda Motor atas dasar harga konstan tahun t; Yt-1 = PDRB Perdagangan Besar dan Eceran;	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan

9/11/14

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Satuan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
				Reparasi Mobil dan Sepeda Motor atas dasar harga konstan tahun t-1.			
		LPE Kategori Industri Pengolahan	Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan	Pertumbuhan ekonomi wilayah kategori Industri Pengolahan dari tahun t-1 ke tahun t $r_t = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100\%$ dengan: r_t = laju pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan tahun t; Y_t = PDRB Industri Pengolahan atas dasar harga konstan tahun t; Y_{t-1} = PDRB Industri Pengolahan atas dasar harga konstan tahun t-1.	Persen	Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan
		Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Data jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Objek Wisata yaang dikelola atau bekerjasama dengan Dinas	Jumlah kunjungan wisatawan di akhir tahun (tahun n) dikurangi jumlah kunjungan wisatawan tahun sebelumnya (tahun n-1) dibagi jumlah kunjungan wisatawan tahun sebelumnya (tahun n-1) dikali 100 persen	Persen	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata	Laporan buku tamu objek wisata
		Persentase pertumbuhan nilai investasi	Pertumbuhan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN) di daerah.	Nilai investasi tahun n dikurangi nilai investasi tahun n-1 dibagi nilai investasi tahun n-1 dikali 100 persen	Persen	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	LKPM

9 YR 4

Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Satuan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1		2		3	4	5	6	7	8
2	Meningkatnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.	IPM adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. $I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$ $IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$	Angka	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks pemberdayaan gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan Keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.	IPG : $\frac{1}{3} [X_{\text{de}}(1) + X_{\text{de}}(2) + \text{Linc-Dist}]$ $X_{\text{de}}(1)$ = Xede untuk harapan hidup $X_{\text{de}}(2)$ = Xede untuk pendidikan Linc-dist = Indeks distribusi pendapatan	Angka	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Publikasi BPS
		2.1	Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung Rata-rata Lama Sekolah adalah penduduk berusia 25 Tahun	$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$	Tahun	Dinas Pendidikan	Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan

9011

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Satuan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
			keatas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.				
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	2. Indeks Pendidikan Indeks Pendidikan dihitung dari rata-rata aritmatik indeks HLS dan indeks RLS $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$	Tahun	Dinas Pendidikan	Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan
		Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi bahwa tingkat kematian pada setiap kelompok usia akan tetap seperti pada tahun yang bersangkutan.	Dihitung dengan metode Long form sp2020, metode ini menghitung AHH berdasarkan rata-rata usia wanita melahirkan anak pertama, rata-rata anak yang pernah dilahirkan dan rata-rata anak yang masih hidup. 1. Indeks Kesehatan $I_{kesehatan} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$	Tahun	Dinas Kesehatan	BPS Katingan
		Prevalensi Stunting	Stunting adalah kondisi terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada masa 1.000 hari pertama kehidupan (dari dalam kandungan hingga balita usia 2 tahun)	Jumlah anak balita stunting pendek/sangat pendek) adalah kondisi anak yang mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang badannya atau tinggi badannya di bawah standar	Persen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan (Bidang Kesehatan Masyarakat)

9 401

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Satuan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
				(berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) RI Nomor 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak) Kategori dan Ambang Batas Status Gizi Anak : Pendek : -3 SD s.d < -2 SD, Sangat Pendek : < -3 SD			
		Persentase penduduk miskin	Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan	Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. <i>Headcount Index</i> secara sederhana mengukur proporsi yang dikategorikan miskin. $P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0$ Dimana P_0 = Persentase penduduk miskin z = Garis kemiskinan y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita satuan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ; $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = Jumlah penduduk	Persen	Dinas Sosial	Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Keterangan: TPT : Tingkat pengangguran terbuka (%) PP : Jumlah pengangguran (orang) PAK : Jumlah angkatan kerja (orang)	Persen	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Ketenaga Kerja	Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik	IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dengan laki-laki. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang	Angka	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan

g w H

Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Satuan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1		2		3	4	5	6	7	8
						sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan pencapaian laki-laki dan Perempuan $IPG = \frac{IPM_p}{IPM_l} \times 100$		Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
3	Meningkatnya cakupan dan kualitas infrastruktur pembangunan yang merata			Indeks Infrastruktur	Indeks infrastruktur merupakan salah satu komponen <i>City Development Index (CDI)</i> yang menilai kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar.	$If = 0,3255 \times P_{jkm} + 0,3343 \times P_{rtaml} + 0,5133 \times P_{rtasl}$ If = Koefisien 0,3255 x PJDKM + 0,3343 x PRTAML + 0,5133 x PRASL <u>Keterangan:</u> (Koefisien 0,3255 dikali Panjang Jalan Kondisi Mantap ditambah 0,3343 dikali Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak ditambah 0,5133 dikali Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak)	Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hasil Penilaian Mandiri
				Persentase kecamatan yang terhubung dengan poros kabupaten	Jumlah kecamatan yang terhubung poros kabupaten	Luas kecamatan yang terhubung poros kabupaten dibagi keseluruhan luas kecamatan dikali 100 persen $P_{kpkab}(\%) = \frac{L_{kpkab}}{L_{totkec}} \times 100\%$	Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hasil Penilaian Mandiri

9 3/4/4

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Satuan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
				Keterangan Pkpkab =Presentase Kecamatan yang terhubung dengan Poros Kabupaten Lkpkab = Luas Kecamatan yang terhubung dengan Poros Kabupaten Ltotkec = Luas Total Kecamatan			
	3.1	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur dasar yang merata untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Panjang jalan kondisi baik yang menghubungkan antar kecamatan $P_{jtap}(\%) = \frac{P_{jbaik} + P_{jsedang}}{P_{jtotal}} \times 100\%$ <u>Keterangan</u> Pjtap(%) = Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap Pjbaik = Panjang Jalan Kondisi Baik Pjsedang = Panjang Jalan Kondisi Sedang Pjtotal = Panjang Total Jalan	Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hasil Penilaian Mandiri
			Persentase jembatan dalam kondisi mantap	Jumlah jembatan kondisi "baik" + "sedang" dibagi jumlah keseluruhan jembatan kabupaten dikali 100 persen $P_{jbt.mtp}(\%) = \frac{jbt_{baik}}{jbt_{total}} \times 100\%$ <u>Keterangan</u> Pjbt mtp (%) = Persentase	Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hasil Penilaian Mandiri

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Satuan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jembatan Kondisi Mantap Jbt Baik = Jembatan Kondisi Baik Jbt total = Total jembatan keseluruhan			
		Persentase desa yang terlayani sektor transportasi	Jumlah trayek yang dilayani moda transportasi antar Desa dan Kecamatan	Jumlah desa yang sudah terlayani sektor transportasi dibagi jumlah keseluruhan desa dikali 100 persen	Persen	Dinas Perhubungan dan Perikanan	Dinas Perhubungan dan Perikanan
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	Rumah tangga yang telah mengakses air minum layak	Jumlah rumah tangga yang telah mengakses air minum layak dibagi keseluruhan jumlah rumah tangga di kabupaten dikali 100 persen $P_{rt.am.lyk}(\%) = \frac{Rt_{am.lyk}}{Rt_{total}} \times 100\%$ <u>Keterangan</u> Prtamlyk (%) = Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak Rtamlyk = Rumah tangga yang memiliki akses air minum layak Rt total = Total Rumah Tangga	Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

9 9 1 4

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Satuan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	Rumah tangga yang telah mengakses sanitasi layak	Jumlah rumah tangga yang telah mengakses sanitasi layak dibagi keseluruhan jumlah rumah tangga di kabupaten dikali 100 persen $Prtmasyk (\%) = \frac{Rtmasi}{Rt\ total} \times 100 \%$ <u>Keterangan</u> Prtmasyk (%) = Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak Rtamlyk = Rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak Rt total = Total Rumah Tangga	Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi mantap	Panjang Jaringan irigasi kondisi baik	$P.ir.k.mtp (\%) = \frac{P.ir.Baik+sedang}{Irigasi\ total\ kab} \times 100 \%$ <u>Keterangan</u> P.ir.k.mtp (%) = Persentase jaringan irigasi dalam kondisi mantap P.ir.Baik + Sedang = Panjang Irigasi Baik + Sedang Irigasi Total Kab = Panjang Total Irigasi Kabupaten	Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase permukiman kumuh yang ditangani	Permukiman kumuh yang ditangani (dengan pengukuran hitungan capaiannya melalui pembangunan/ peningkatan	Jumlah permukiman kumuh yang ditangani dibagi jumlah keseluruhan permukiman kumuh di	Persen	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan	Dra SK Kawasan Kumuh (SK belum selesai

Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Satuan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1		2		3	4	5	6	7	8
						kabupaten dikali 100 persen		Permukiman Serta Pertanahan	dan belum terbit)
4	Terwujudnya kondisifitas dalam kehidupan bermasyarakat dalam semangat "Penyang Hinje Simpei" (semangat dalam persatuan dan kesatuan).			Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks kerukunan umat beragama adalah sebuah bentuk pengukuran nilai kehidupan rukun antaragama yang akan dilaksanakan dalam bentuk survey dengan variable yang menjadi tolak ukur nantinya akan disesuaikan dengan kondisi daerah. Pelaksanaan survei akan dilakukan oleh pihak ke 3 dengan sasaran 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Katingan dan didampingi dari Forum Kerukunan Umat Beragama dan Badan Kesbangpol.	$Indeks T = \frac{\sum_{i=1}^n I_i}{n}$ T = indeks dimensi toleransi I_i = nilai aspek i pada dimensi toleransi n = banyaknya aspek pada dimensi toleransi $Indeks KS = \frac{\sum_{i=1}^n I_i}{n}$ KS = indeks dimensi kerja sama I_i = nilai aspek i pada dimensi kerja sama n = banyaknya aspek pada dimensi kerja sama $Indeks K = \frac{\sum_{i=1}^n I_i}{n}$ K = indeks dimensi kesetaraan I_i = nilai aspek i pada dimensi kesetaraan n = banyaknya aspek pada dimensi kesetaraan $KUB Provinsi = \frac{T_i + K_i + KS_i}{3}$ $KUB Provinsi$ = indeks kerukunan umat beragama T_i = indeks dimensi toleransi K_i = indeks dimensi kesetaraan KS_i = indeks dimensi kerja sama	Angka	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas
				Persentase penyelesaian kasus SARA	Persentase Penyelesaian Kasus SARA adalah sebuah pengukuran dalam bentuk satuan persen dengan menghadirkan 2 buah yaitu 1. Variabel Pertama adalah Jumlah Kasus yang terdeteksi terjadi di Kabupaten Katingan 2. Variabel Kedua adalah Jumlah kasus yang sudah difasilitasi dalam penyelesaiannya. Kasus-kasus yang termasuk dalam SARA yaitu kasus	Jumlah kasus SARA yang diselesaikan dibagi jumlah keseluruhan kasus SARA yang terjadi atau dilaporkan dikali 100 persen	Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Kewaspadaan Nasional

Handwritten signature/initials.

Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Satuan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1		2		3	4	5	6	7	8
					pertikaian antarsuku, agama, ras dan golongan.				
		4.1	Meningkatnya rasa aman dan nyaman bermasyarakat melalui pendekatan sosial budaya lokal.	Persentase penurunan kasus kriminal	Mengindikasikan seberapa besar jumlah kasus kriminal berkurang dalam suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya	Jumlah kasus kriminal di tahun lalu (tahun n-1) dikurangi jumlah kasus kriminal di akhir tahun (tahun n)] dibagi [jumlah kasus kriminal di tahun lalu (tahun n-1)] dikali 100 persen	Persen	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Polres Katingan
				Persentase penanganan kasus K3	Mengindikasikan seberapa besar jumlah kasus K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) yang ditindaklanjuti atau ditangani dibandingkan dengan jumlah keseluruhan kasus K3 yang dilaporkan atau terjadi	Jumlah kasus K3 yang ditindaklanjuti atau ditangani dibagi jumlah keseluruhan kasus K3 yang dilaporkan atau terjadi dikali 100 persen	Persen	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
				Persentase konflik sosial yang ditangani	Persentase penyelesaian kasus konflik sosial adalah sebuah pengukuran dalam bentuk satuan persen dengan dengan menghadirkan 2 buah yaitu : 1. Variabel Pertama adalah jumlah Kasus yang terdeteksi terjadi di Kabupaten Katingan 2. Variabel Kedua adalah jumlah kasus yang sudah difasilitasi dalam penyelesaiannya. Kasus-kasus yang termasuk dalam konflik sosial yaitu konflik individu dengan	Jumlah konflik sosial yang ditangani dibagi jumlah keseluruhan konflik sosial yang terjadi atau dilaporkan dikali 100 persen	Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Kewaspadaan Nasional

9 31 6

Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Satuan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1		2		3	4	5	6	7	8
					individu, konflik internal individu, konflik antar kelas sosial, konflik antarkelompok sosial, konflik antargenerasi, Konflik yang bersifat deskruktif dan konstruktif, konflik berdasarkan aktivitas manusia di dalam Masyarakat, bahkan konflik antarnegara juga termasuk dalam konflik sosial.				
				Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan melalui keputusan bupati dan terpelihara.	Jumlah benda,situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dibagi keseluruhan benda,situs, dan kawasan cagar budaya di kabupaten dikali 100 persen	Persen	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata	Keputusan Bupati tentang penetapan Cagar Budaya Kabupaten
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang bersinambungan			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan angka capaian tahunan yang menggambarkan kualitas lingkungan Kabupaten Katingan dalam kurun waktu 1 tahun, indikator perhitungan yang meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Perhitungan dilakukan serentak seluruh Indonesia melalui laman Aplikasi IKLH KLHK pada <i>timeline</i> yang ditetapkan setelah penginputan	IKLH Kabupaten = $(30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$	Poin	Dinas Linkungan Hidup	Perhitungan Mandiri

9 10

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Satuan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
			selesai dan biasanya akan rilis nilai IKLH final pada akhir tahun.				
	5.1 Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Air (IKA)	IKA adalah metode sederhana yang digunakan sebagai bagian dari survei kualitas air secara umum dengan menggunakan sekelompok parameter yang mengurangi sejumlah besar informasi ke tunggal, biasanya berdimensi, dengan cara yang mudah direproduksi. Pada tahun 2024 terjadi penambahan titik pantau disebabkan nilai IKA yang tidak mencapai target dari tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan dengan adanya penambahan titik pantau tersebut dapat menambah nilai IKA untuk tahun 2024. Sesuai dengan titik pantau yang ditetapkan dan telah disetujui KLHK jumlah titik pantau sebelumnya sebanyak 15 titik, namun karena ada penambahan sebanyak 12 titik maka pada tahun 2024 jumlah titik pantau berjumlah sebanyak 27 titik pantau.	Nilai relatif = $\frac{C_i}{L_{ij}}$ Rumus metode IP: $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{\text{Rata-rata}} + (C_i/L_{ij})^2_{\text{Maksimum}}}{2}}$ $0 \leq PI_i \leq 1.0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu) $1.0 < PI_i \leq 5.0 \rightarrow$ cemar ringan $5.0 < PI_i \leq 10.0 \rightarrow$ cemar sedang $PI_i > 10.0 \rightarrow$ cemar berat	Poin	Dinas Lingkungan Hidup	Perhitungan Mandiri
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	IKU adalah skala yang memberikan informasi <i>real-time</i> mengenai jumlah polusi di udara wilayah Kabupaten Katingan. Kegiatan pengambilan sampel udara ambien dengan	$IKU = 100 - [50/0.9 \times (Sen - 0.1)]$	Poin	Dinas Lingkungan Hidup	Perhitungan Mandiri dari bidang

9.2.4.6

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Satuan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
			menggunakan pasife sampler yang dikoordinir oleh KLHK belum dilaksanakan. Kegiatan tersebut dibagi menjadi dua tahap per tahun.				
		Indek Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	IKTL adalah suatu alat ukur yang mengukur tingkat kualitas penutupan lahan dalam suatu wilayah. IKTL dibuat dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti tipe dan luas dari tutupan lahan, stabilitas ekosistem dan tingkat degradasi lahan dan dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan.	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan	Poin	Dinas Lingkungan Hidup	Perhitungan Mandiri dari bidang
	5.2 Meningkatnya ketahanan terhadap bencana daerah.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Penilaian tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah	$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$	Angka	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Nasional Penanggulangan Bencana

9 XH 6

Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Satuan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1		2		3	4	5	6	7	8
6	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel			Indeks RB	Indeks Reformasi Birokrasi adalah suatu indikator yang menilai upaya pemerintah dalam melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap tata kelola internal instansi pemerintah dan penilaian percepatan penyelesaian isu nasional, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintah (fokus stunting) dan program prioritas Presiden (P3DN)	Hasil evaluasi KemenPANRB	Predikat	Sekretariat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi Kemen PANRB
		6.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Merupakan penilaian terhadap rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	Nilai Perencanaan+Nilai Pengukuran+Pelaporan+ Evaluasi Internal	Predikat	Inspektorat, Bapedalitbang, Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan dan Seluruh Perangkat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Kementrian PANRB
				Nilai LPPD	Skor nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) merupakan hasil penilaian terhadap evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Hasil	Penilaian Kemendagri terhadap LPPD	Kriteria	Sekretariat Daerah, Inspektorat dan seluruh perangkat daerah	Peringkat dalam Laporan EKPPD dari Kemendagri

981

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Satuan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
			EKPPD (Evaluasi Kinerja dan Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) digunakan pemerintah sebagai dasar untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi atau pembentukan, penghapusan/ penggabungan daerah otonom. Skor nilai LPPD dihitung berdasarkan nilai Indeks Komposit Kinerja (IKK) penyelenggaraan pemerintah daerah				
		Opini BPK	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern	Hasil Evaluasi/ Opini BPK	Predikat	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
		Nilai MCP	Penilaian atas 8 Indikator Area Intervensi Monitoring Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah	Penilaian MCP KPK	Poin	Inspektorat	Website : jaga.id

9001/

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Satuan	Penanggung Jawab	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	6.2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan Kualitatif	$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} \times \frac{1}{X} \times N$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ SKM Unit pelayanan x 25	Skor	Sekretariat Daerah	Laporan Hasil SKM
			Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah alat untuk mengukur kinerja pelayanan publik di Indonesia. IPP digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan masyarakat merasa puas	Hasil Evaluasi Kementerian PANRB	Nilai	Sekretariat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi Kementerian PANRB
			Indeks SPBE	Indeks SPBE digunakan untuk melihat Tingkat kematangan (<i>maturity level</i>) dari pelaksanaan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik di instansi pemerintah	$\text{INDEKS SPBE} = \sum ND_j \times BD_j$ Keterangan : - NDj = Nilai Indeks Domain ke-j - BDj = Bobot Domain ke-j $\text{INDEKS DOMAIN} = \frac{1}{BD_i} \sum NA_i \times BA_i$ Keterangan : - BD_i = Bobot Domain ke-i - NA_i = Nilai Indeks Aspek ke-i - BA_i = Bobot Aspek ke-i $\text{INDEKS ASPEK} = \frac{1}{BA_k} \sum NI_k \times BI_k$ Keterangan : - BA_k = Nilai Bobot Aspek ke-k - NI_k = Nilai Tingkat Kematangan indikator ke-k - BI_k = Nilai Bobot indikator ke-k	Predikat huruf	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian serta seluruh perangkat daerah	Laporan Hasil Evaluasi Kemen PAN RB

9044

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Satuan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase desa berkembang	Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ($\leq$) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989, dengan ciri-ciri memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa	Jumlah Desa Kategori "Berkembang" dibagi Jumlah Keseluruhan desa dikali 100 persen	Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Hasil Penghitungan Tingkat Perkembangan Desa



 BUPATI KATINGAN,

 SAIFUL